

PERENCANAAN *BOTTOM UP* DALAM BIDANG PEMBANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

(Study Kasus Bidang pendidikan Dasar Tahun 2006 – 2011)

Penulis: JEFRI, Dosen Pembimbing: DR. Khairul Anwar, M.Si. Jurusan Ilmu Pemerintahan-
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Riau. J3f_coy85@yahoo.com

Abstract

The aimed of this research is to describe the bottom up planning in siak district by looking at the basic development plan formulation in siak district. In collection the data the writer used interviews technique with the people who have information and involvement in the process of the basic education development planning in siak district. The research methodology in this research is descriptive analysis method with the qualitative approach that use to analyzed the problems that arised in the field and try to described it well.

Based on the phenomenon, so the writer could explained that base education development planning in siak districk stage some planning : Formulating procces, Formulation goal process, Designed a budget. From this research, the writer could concluded that the base education development planning in Siak district, especially in Siak river mostly had involved the society in basic education development plan as happened in Tanjung Pal village, in the village rarely did the Munsrenbang activities, it should be consideredby goverment of Siak, especially Apit River district government of Siak, especially Apit River district district government.

Keywords : Planning, Formulation, Bottom Up, Building and Goverment

A. Latar belakang masalah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan adalah merupakan satu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Penyusunan rencana pembangunan ini tersebut dirumuskan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam musrenbang tersebut seluruh pelaku/aktor pembangunan dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai proses perencanaan pembangunan dari tingkat Kelurahan, yang dilanjutkan di tingkat Kecamatan dan sampai dengan tingkat Kota yang pada akhirnya bermuara pada rencana kegiatan tersebut mendapatkan kepastian dibiayai dari APBD yang siap dioperasionalkan. Di dalam proses inilah seringkali berbagai muatan akan senantiasa mengedepankan aspirasi dan kepentingannya sendiri-sendiri. Kondisi inilah yang memunculkan bias dan deviasi aspirasi yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat luas dikalahkan oleh kepentingan kelompok-kelompok kecil yang tentunya hanya menguntungkan kelompok tersebut dan melupakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Gambaran bagaimana proses penyusunan rencana pembangunan tahunan yang dimulai dari struktur pemerintahan paling bawah yaitu Kelurahan, dilanjutkan di tingkat Kecamatan dan

pada akhirnya sampai di tingkat Kota sangat diperlukan. Hal ini penting, karena di setiap level pemerintahan inilah aspirasi baik dari masyarakat..

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas dan berdasarkan fenomena yang telah ada, maka penulis dapat menetapkan perumusan masalah yaitu : "Bagaimanakah Perencanaan *Bottom Up* Dalam Bidang Pembangunan Pendidikan Dasar?"

1. Apakah didalam proses perumusan perencanaan *Bottom up* dalam bidang pembangunan pendidikan dasar melibatkan masyarakat?
2. Bagaimanakah proses rumusan tujuan pendidikan dasar Kabupaten Siak?
3. Bagaimanakah proses merancang anggaran pendidikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penulis Melakukan Penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui Apakah didalam proses perumusan perencanaan *Bottom up* dalam bidang pembangunan pendidikan dasar melibatkan masyarakat
- b. Untuk mengetahui proses rumusan tujuan pendidikan dasar Kabupaten Siak
- c. Untuk mengetahui proses merancang anggaran pendidikan

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sumbangan pemikiran bagi instansi – instansi pemerintah yang membutuhkan, khususnya bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dalam pembangunan pendidikan dasar.
- b. Sumbangan bagi pihak – pihak lain atau peneliti lanjutan, khususnya yang memiliki kajian yang mirip dengan kajian ini.

D. Kerangka Teoritis

a. Perencanaan Pembangunan

Definisi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek aktivitas Conyers (1984: 5) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada dimasa datang.

Adapun tahapan-tahapan dalam suatu proses perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut (Bintoro dalam Syaifullah, 2008):

1. Tinjauan keadaan
2. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana
3. Penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut
4. Identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana
5. persetujuan rencana.

b. Bottom Up Planning

Perencanaan yang lahir dari bawah (*bottom up*) bukan lahir atas (*top-down*) atau Pemerintah Daerah. Menurut Alexander Abe (2002;71), langkah-langkah perencanaan yang disusun dari bawah (*bottom up*) dan bukan dari perencanaan atas inisiatif dari pemerintah daerah yaitu :

1. Penyelidikan
2. Perumusan Masalah.
3. Identifikasi Daya Dukung.
4. Perumusan Tujuan.
5. Menetapkan Langkah-Langkah Secara Rinci
6. Merancang Anggaran

c. Pendidikan

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Menurut Carter (1977) Pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang dipimpin (khususnya di sekolah) sehingga ia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan kepribadiannya.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitian ini dideskripsikan secara jelas dan terperinci yaitu memberikan gambaran secara komprehensif tentang perencanaan bottom up dalam pembangunan pemerintah kabupaten siak (studi kasus bidang pendidikan dasar tahun 2006 – 2011).

Data yang digunakan ada dua yaitu, data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data-data yang berhubungan dengan proses perumusan perencanaan pendidikan dasar, proses rumusan tujuan pendidikan, dan proses merancang anggaran pendidikan di Kabupaten Siak.

Selain data sekunder tersebut diatas, digunakan pula data primer. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu teknik wawancara dan observasi. Cara ini ditempuh dengan alasan yaitu informasi dapat digali dari sumbernya secara langsung sehingga tingkat kepercayaannya lebih baik dibandingkan teknik kuisioner. Selain itu dengan teknik ini juga diharapkan akan mendapatkan suatu pengamatan tentang keadaan lapangan secara langsung serta mendapatkan informasi berupa fakta dan opini yang lebih luas namun tetap dalam konteks pembahasan.

Sumber data primer dipilih secara purposive baik yang berkaitan dengan daerah maupun informan yang akan diwawancarai. Pemilihan informan lebih didasarkan pada data yang ingin diperoleh. Penggalan informasi yang berkaitan dengan program pemerintah akan ditanyakan dengan agen-agen perencana yang ada di lembaga pemerintah.

Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Camat Sungai Apit, Kantor Desa Sungai Rawa, Kantor Desa Tanjung Pal, SDN 12 Sungai Rawa, MTS Nurul Ihsan Sungai Rawa, SDN 18 Tanjung Pal, SD/SMP Satu Atap Tanjung Pal. Peneliti tertarik memilih lokasi penelitian ini karena peneliti bisa mendapatkan data yang dibutuhkan atau mewawancarai narasumber yang berkompeten dan akurat sehingga bisa dipertanggung jawabkannya karya tulis ini.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data-data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan perencanaan bottom up dalam pembangunan pemerintah kabupaten siak (studi kasus bidang pendidikan dasar tahun 2006 – 2011). Hasil kajian dokumen dan hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk teks deskriptif.

F. HASIL PENELITIAN : PERENCANAAN *BOTTOM UP* DALAM BIDANG PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SIAK

1. Proses perumusan perencanaan pembangunan pendidikan dasar

a. Pihak yang terlibat dalam proses rumusan masalah pembangunan pendidikan dasar

Dalam proses ini, salah satu aktor yang harus terlibat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan pendidikan dasar ini adalah masyarakat, karena masyarakat yang sangat mengetahui apa yang dibutuhkan daerahnya sendiri. Selain masyarakat, tokoh pendidikan (Kepsek) yang berada di daerah tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Perwakilan Daerah, Camat, dan utusan dari Kabupaten serta utusan dari Tingkat Provinsi agar perencanaan pembangunan pendidikan tidak bertentangan dengan visi misi Kabupaten dan Provinsi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Rawa, yaitu :

“Musrenbang dimulai dari tingkat dusun diteruskan ke desa dengan melibatkan kepala sekolah, tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perwakilan dari kecamatan, dan utusan dari kabupaten.” (*hasil wawancara dengan Bapak H. Jaa'far, Kepala Desa Sungai Rawa, hari rabu 10 oktober 2012 jam 09.35 wib di Kantor Desa Sungai Rawa*).

b. Kepentingan dalam proses rumusan

Proses perumusan sangat dibutuhkan didalam perencanaan suatu pembangunan, Perumusan masalah memiliki fungsi sebagai berikut yaitu Fungsi pertama adalah sebagai pendorong suatu kegiatan perencanaan menjadi diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan perencanaan itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Fungsi kedua, adalah sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu perencanaan. Agar rumusan perencanaan pembangunan pendidikan dasar ini dapat mencerminkan kebutuhan dari komunitas (masyarakat dan sekolah), tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat dalam proses tersebut.

Dalam (Renstra Dinas Pendidikan Kab. Siak tahun 2011) Dinas Pendidikan Kabupaten Siak mempunyai rencana program yaitu: (1). Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. (2) Pemerataan dan perluasan akses. Didalam proses pembangunan pendidikan dasar masyarakat harus dilibatkan secara utuh, karena masyarakat sangat mengetahui kondisinya, serta masyarakat bisa menggali, mengumpulkan informasi, dan mengenali secara seksama masalah-masalah yang ada disekitarnya. Hubungan dengan perumusan masalah bahwa hasil positif dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan dasar tersebut adalah masalah yang diusulkan dalam Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten memang benar-benar apa yang dirasakan masyarakat desa, Oleh karena itu akan menjadikan lebih mudah dalam tahap proses perumusan perencanaan pembangunan pendidikan dasar. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala sekolah SDN 12 Sungai Rawa, berikut kutipan hasil wawancaranya:

“Proses perumusan perencanaan pembangunan pendidikan dasar dilakukan dengan melihat apa yang diinginkan oleh sekolah tentang kekurangan sarana prasarana, setelah itu dimusyawarahkan pada rapat sekolah dan pihak komite sekolah kemudian di musyawarahkan di dalam musrenbang tingkat desa yang dihadiri oleh aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan dari pihak sekolah. Hasil musyawarah tersebut kemudian dibuat proposal untuk yang akan ditujukan ke Dinas Pendidikan dan UPTD yang diketahui Camat.” *(hasil wawancara dengan Bapak Azwir, S.Pd, Kepala Sekolah SDN 12 Sungai Rawa, hari sabtu 6 oktober 2012 jam 08.53 wib di Kantor Kepala Sekolah SDN 12 Sungai Rawa).*

d. Sumber daya

Sumber daya merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam perencanaan pembangunan pendidikan dasar, sumber daya ini juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam perencanaan pembangunan.

Dalam (Renstra tahun 2006 – 2011) untuk meningkatkan sumber daya, Dinas Pendidikan Kabupaten Siak mempunyai rencana program yaitu : 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs. 2 Penyediaan beasiswa prestasi untuk SD dan SMP 3. Penyediaan beasiswa kurang mampu untuk SD dan SMP. 4. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pelayanan publik.

2. Rumusan Tujuan pembangunan pendidikan dasar

a. Pihak yang terlibat dalam rumusan tujuan pembangunan pendidikan dasar

Dalam proses perumusan tujuan ini sangat penting bagi tahapan perencanaan pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Siak, dalam tahapan rumusan tujuan ini masyarakat juga dilibatkan melalui Musrenbang, karena perencanaan pembangunan pendidikan dasar atas dasar kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Camat Sungai Apit, berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk tim perumus tujuan pendidikan melalui Musrenbang di Kecamatan yang menjadi tim perumus yaitu: Camat, Sekretaris Camat, Kasi PMD, UPTD Pendidikan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat.” *(hasil wawancara dengan Bapak Mursal, S.sos, Camat Sungai Apit, hari selasa 9 oktober 2012 jam 11.00 wib di Kantor Camat Sungai Apit).*

b. Kepentingan dalam rumusan tujuan

Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. Dalam proses perumusan tujuan ini sangat penting untuk tahapan perencanaan pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Siak, oleh sebab itu dalam merumuskan akan dilibatkan pihak – pihak yang sangat mengetahui dari kondisi yang hendak dicapai, hal ini dilakukan karena agar tidak melenceng dari visi misi dinas pendidikan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Sarana Prasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Siak yaitu :

“Kondisi yang hendaknya dicapai dalam pembangunan pendidikan dasar melalui pelaksanaan Musrenbang ini adalah usulan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing kecamatan. Sedangkan yang ditunjuk sebagai tim perumus adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Seluruh Kasi, dan seluruh Kabag di Dinas Pendidikan Kabupaten Siak ”(*hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Zulhelmi, Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, hari selasa 4 september 2012 jam 10.15 wib di Kantor KABID Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Siak*).

Selanjutnya dijelaskan lagi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak yaitu :

“Dalam merumuskan tujuan untuk perencanaan perencanaan *bottom up* dalam bidang pembangunan pemerintah Kabupaten Siak (study kasus bidang pendidikan dasar tahun 2006 - 2011), maka akan dihadiri oleh DPRD Kabupaten, dan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, hal ini dilakukan agar dalam merumuskan tujuan tidak melengceng dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Siak.” (*hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Kadri Yafis, M.Pd Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, hari kamis 30 agustus 2012 jam 11.00 wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Siak*).

c. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal terpenting dalam merumuskan tujuan pendidikan di Kabupaten Siak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya adalah kualitas dari manusia itu sendiri, karena dalam merumuskan tujuan pendidikan sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang sangat berkualitas.

Sumber daya manusia dalam tahap ini rumusan tujuan ini yaitu pihak – pihak yang terlibat langsung dalam proses rumusan tujuan dan pihak – pihak yang dianggap paling mengetahui suatu tujuan yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Sarana Dan Prasana Dinas Pendidikan Kabupaten Siak yaitu :

“Kondisi yang hendaknya dicapai dalam pembangunan pendidikan dasar melalui pelaksanaan Musrenbang ini adalah usulan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing kecamatan. Sedangkan yang ditunjuk sebagai tim perumus adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Seluruh Kasi, dan seluruh Kabag di Dinas Pendidikan Kabupaten Siak ”(*hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Zulhelmi, Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, hari selasa 4 september 2012 jam 10.15 wib di Kantor KABID Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Siak*).

3. Merancang anggaran pembangunan pendidikan dasar

a. Pihak yang terlibat dalam merancang anggaran

Dalam proses ini masyarakat tidak lagi dilibatkan, dalam proses ini masyarakat hanya sekedar besifat menerima dari yang sudah disusun oleh pemerintah sesuai dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan. Pihak – pihak yang terkait dalam merancang anggaran ini antara lain dimulai dari pihak a. Pemerintah Provinsi, dalam hal ini pihak tersebut melakukan monitoring dan sosialisasi dengan pihak Kab/Kota tentang pelaksanaan DAK untuk pendidikan dasar. b. Pemerintah Kab/Kota, pihak tersebut menganggarkan dana pendamping dalam APBD

sekurang-kurangnya sepuluh persen dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pihak tersebut Membentuk tim teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana peningkatan mutu pendidikan di sekolah. d. Kepala Sekolah, pihak tersebut Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah.

b. Kepentingan merancang anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan, karena dalam proses inilah yang menjadi terlaksananya proses pembangunan tersebut atau tidak. Di Indonesia, sumber-sumber dana untuk pendidikan diperoleh dari APBN, yang diperoleh dari pajak, hasil keuntungan ekspor-impor (migas dan non migas), dan bantuan pinjaman asing. Dimana alokasi anggaran untuk pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan adalah minimal sebesar 20 %. (UUSPN No. 20 tahun 2003).

Besaran alokasi anggaran tersebut di titikberatkan pada tujuan pendidikan nasional atau kebijakan pembangunan nasional, yaitu : 1. Peningkatan mutu pendidikan. 2. Pemerataan 3. Relevansi 4. Efisiensi manajemen. Dimana difokuskan untuk Penuntasan WAJARDIKDAS (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) 9 tahun. Untuk anggaran pendidikan Nasional, biasanya terdiri : Anggaran Rutin, terdiri dari : gaji, belanja barang, dan biaya operasional lainnya, yang dituangkan dalam DIK. Anggaran pembangunan, terdiri dari : membangun fasilitas pendidikan, pengadaan peralatan pendidikan, berbagai program pembangunan non fisik sesuai dengan perencanaan pendidikan.

c. Sumber daya

Merancang anggaran usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia. Penyusunan anggaran ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan. Kekeliruan dalam menyusun alokasi, akan membuat suatu rencana kandas di tengah jalan. Dalam rangka menunjang sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Siak, sekaligus meningkatkan mutu serta pemerataan pendidikan pada tahun anggaran 2010, Pemerintah Kabupaten Siak mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBD sebesar Rp343 miliar. Hal ini disampaikan Bupati Siak, H Arwin AS SH pada saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Siak 2010, di gedung DPRD Siak. (Dumai pos, Selasa 12 januari 2010).

Menurut bupati, anggaran sebesar Rp343 miliar lebih yang diperuntukan bagi pendidikan di Kabupaten Siak merupakan komitmen pemerintah yang diambil dari anggaran APBD Siak sebesar 20 persen dari total penerimaan anggaran daerah. Hal ini tentunya agar pos untuk peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Siak terus mendapat perhatian, karena tujuan dari Pemerintah Kabupaten Siak adalah pembangunan Kabupaten Siak harus dibarengi dengan tingkat pendidikan yang seimbang. Sehingga, antara tuntutan pembangunan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dapat dimbangi.

G. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menarik beberap kesimpulan yaitu :

1. Proses perumusan perencanaan pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Siak dengan mengolah data sehingga diperoleh gambaran yang lengkap, utuh mendalam dengan melibatkan masyarakat dan berbagai lapisan. Namun data-data yang dihimpun belum merupakan sesuatu yang benar-benar dirasakan masyarakat, hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan, dimana masih ada sekolah-sekolah yang tidak diikuti sertakan dalam Musrenbang, seperti yang terjadi di Desa Tanjung Pal Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
2. Berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan dari tahap perumusan tujuan dalam perencanaan *bottom up* dalam bidang pembangunan pemerintah Kabupaten Siak (study kasus bidang pendidikan dasar) dapat diketahui dalam perumusan tujuan sudah menggunakan prinsip-prinsip :
 - a. *Transparan*, proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dibangun sejak mulai tingkat kelurahan sudah diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat Kecamatan dan Kabupaten Siak.
 - b. *Responsif*, usulan kegiatan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat Kecamatan Sungai Apit.
 - c. *Partisipatif*, keterlibatan masyarakat Kecamatan Sungai Apit menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat.
 - d. *Akuntabel*, Seluruh proses dilakukan secara *transparan*, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat Kecamatan Sungai Apit dan hasilnya hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dengan adanya proses Merancang anggaran dalam perencanaan *bottom up* dalam bidang pembangunan pemerintah Kabupaten Siak (study kasus bidang pendidikan dasar) sesuai dengan disampaikan oleh Abe (2005) menjelaskan "Penyusunan anggaran ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan. Anggaran untuk pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Siak Menurut informan hampir mempunyai jawaban sama bahwa dalam kolom tersebut yakni 20% dari anggaran APBD yang tersedia.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan juga kesimpulan penulis, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Dalam proses perumusan perencanaan pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Siak khusus nya di Kecamatan Sungai Apit sebagian besar sudah melibatkan masyarakat, akan tetapi tidak semua desa yang melibatkan masyarakatnya didalam proses perumusan perencanaan pembangunan, seperti yang terjadi di Desa Tanjung pal, di desa tersebut jarang sekali melakukan kegiatan Musrenbang, hal ini harus lebih diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Siak, khususnya Pemerintah Kecamatan Sungai Apit.
2. Pemerintah Kabupaten Siak hendaknya lebih memperhatikan desa – desa yang tidak melibatkan masyarakat dan tokoh – tokoh yang semestinya ada di dalam Musrenbang agar tercapainya tujuan pemerintah Kabupaten Siak.
3. Didalam proses anggaran diharapkan pemerintah Kabupaten Siak tidak hanya terpaku pada anggaran yang telah ditentukan oleh Undang – Undang yaitu 20% dari APBD, semestinya Pemerintah Kabupaten Siak memberi lebih dari yang di amanatkan Undang – Undang agar

tercapainya tujuan Dinas pendidikan di bidang pembangunan pendidikan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, **Perencanaan Daerah Partisipatif**, Pondok Edukasi, Solo.
- Antonny, Bagul, Dagur, 2004, **Prosperk & Strategi Pembangunan Kabupaten Manggarai Dalam Perspektif Masa Depan**, Indomedia, Bogor.
- B, Bobi, Setiawan, 2002, **Hak Suara Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Tata Ruang**
- Budi, Winarno, 2008, **Kebijakan Publik: teori dan Proses**, PT buku Kita, Jakarta.
- Conyers, Diana, 1991, **Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Dirgantoro, Crown, 2004, **Manajemen Strategik**, PT. Grasindo, Jakarta.
- Husman, Husaini, dan Setiady, Purnomo, Akbar, 2009, **Metodologi Penelitian Sosial**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajab, 2004, **Otonomi dan Pembangunan Daerah**, Erlangga, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Remaja, Jakarta
- Munir, Badrul, 2002, **Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah**, Bappeda Propinsi NTB, Mataram.
- Nasution, S, 1992, **Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif**, Tarsito, Bandung,
- Nawawi Hadari, 1985, **Metode Penelitian Sosial**, UGM, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, **Metodologi Ilmu Pemerintahan**, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- P. Joko, Subagyo, 2011, **Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Riyadi dan Supriady, Deddy, Bratamakusumah, 2005, **Perencanaan Pembangunan Daerah**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Siti, Bulkis, **Perencanaan Partisipatif** in Kuliah Teori Perencanaan.
- Suhirman, 2003, **Partisipasi Dalam Pembuatan Kebijakan**, PEG-USAID, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1977, **Perencanaan Pembangunan**, Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 2003, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, _____, Alfabeta.
- Western, John, S, and Wilson, Paul, R, 1977, **Planning Turbulent Environment**, University of Queensland Press, St.Lucia Queensland.
- Wiroatmodjo, Piran dkk, 2001, **Otonomi dan Pembangunan Daerah** (Bahan ajar Diklatpim IV), Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Tesis

- Syahrin, Arafat. 2009. **Strategi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar (Study Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005 – 2008)**. Pekanbaru
- Harto, Agus, Wibowo. 2009. **Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)**, Semarang.

Syaifullah, 2008, **Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahun 2007)**, Semarang.

Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**.

Undang-Undang No 20/03 tentang **Bidang Pembangunan**

Siak Dalam Angka 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2006 – 2011

RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Siak tahun 2011 - 2016

<http://share-apa-aja.blogspot.com/20...-down-and.html>